

SE PPKM Darurat Diusulkan Jadi Perda

SALATIGA (KR) - Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit mengusulkan agar Surat Edaran (SE) Walikota Nomor 443.1/551/101.2 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Salatiga segera mungkin dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya, agar penanganan dan penegakan hukum terkait pemutusan rantai penyebaran virus korona semakin kuat dan jelas. Saat ini Kota Salatiga ditetapkan sebagai salah satu dari 44 daerah di Jawa- Bali yang menerapkan PPKM Darurat.

"Salatiga merupakan salah satu daerah secara nasional ditetapkan PPKM Darurat Covid-19. Untuk itu kami mengusulkan agar SE Walikota tentang PPKM Darurat Covid-19 dijadikan Perda. Sehingga tindakan aparat penegak hukum kepada masyarakat semakin jelas," tandas Dance Ishak Palit saat Rapat Paripurna DPRD Salatiga, Senin (5/7).

Menurutnya, kalau hanya sebatas SE saja, para penegak hukum akan kesulitan melakukan penindakan, padahal kondisinya darurat. Perda apabila sudah diterbitkan bisa dijadikan dasar hukum penindakan, termasuk bagi masyarakat yang abai protokol kesehatan. Dance juga berharap agar dibentuk tim relawan tingkat kelurahan berkaitan dengan pemulasaran jenazah Covid-19 dan tim khusus pemakaman dengan dibiayai APBD Salatiga. (Sus)



KR-Chandra AN

PELAKSANAAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Semarang mulai menyusur warung-warung makan dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selama dua hari, Senin-Selasa (5-6/7) petugas gabungan dari Satpol PP, Polsek Candisari dan Koramil Gajahmungkur Semarang menertibkan warung yang masih menerima pengunjung untuk makan di tempat. Mereka yang kedapatan masih melanggar diberi peringatan keras, bahkan selanjutnya akan dilakukan penyitaan meja kursi apabila sudah tidak mengindahkan aturan PPKM. Sementara warung-warung yang tetap buka di luar jam yang diatur akan disemprot air pemadam. Sikap tegas ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera demi memutus mata rantai Covid-19.

Boleh Beli di Warung, Tetapi Harus Dibawa Pulang

KLATEN (KR) - Boleh jajan di warung namun tidak boleh makan di tempat, melainkan harus dibawa pulang. Hal ini dikemukakan Kepala Satpol PP Kabupaten Klaten Joko Hendrawan, saat memimpin operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) di masa PPKM Darurat untuk menekan laju penularan Covid 19, Senin (5/7).

Operasi dilakukan oleh tim gabungan Satpol PP, TNI, Polri, dan elemen lainnya. Petugas menyisir pertokoan dan warung-warung di sepanjang Ja-



KR-Sri Warsiti

Petugas melakukan operasi penegakan Prokes Covid-19 di Jalan Pemuda.

lan Pemuda Klaten. Tim yang dipimpin Joko Hen-

drawan antara lain mengecek penerapan prokes

di Toko Enom. Mereka mengingatkan kembali pada pemilik toko agar membatasi jumlah pengunjung. "Tadi sudah ada lima titik yang kami kunjungi, dan semua mereka rata-rata sudah mematuhi aturan," kata Joko Hendrawan.

Joko Hendrawan menegaskan, jika ada yang melanggar instruksi bupati, pasti akan ditindak tegas. Yakni dengan penyegelan atau penutupan tempat usaha tersebut. Menurut Joko Hendrawan, ada dua tim yang melakukan operasi yustisi. Tim yang dipimpin Joko Hendrawan

menyisir pertokoan, sedangkan tim lainnya menyisir panti-panti pijat dan restoran atau rumah-rumah makan yang masih melayani makan di tempat.

Sutarjo penjual rujak yang biasa mangkal di Jalan Pemuda mengemukakan, ia tetap berjualan mulai pukul 10.30 hingga pukul 14.30. Namun demikian, ia hanya melayani warga yang membeli untuk dibawa pulang. "Kami patuh pada pemerintah. Tetap berjualan, tetapi tidak ada yang makan di sini, semua dibawa pulang," kata Sutarjo. (Sit)

Kurangi Kerumunan, Perbanyak Outlet Vaksinasi

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, vaksinasi di Jateng tetap dilakukan. Gubernur minta agar outlet atau tempat vaksinasi diperbanyak untuk mengurangi kerumunan saat vaksinasi.

Ganjar Pranowo menyampaikan hal itu kepada wartawan di Semarang, Selasa (6/7). Untuk mencegah penurunan Covid-19, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mempercepat proses vaksinasi. Untuk itu, pelaksananya harus tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dengan ketat agar tidak terjadi kerumunan.

Ganjar Pranowo mengatakan, untuk percepatan vaksinasi itu juga harus didukung dengan tempat vaksinasi yang cukup dan tersebar di beberapa tempat. Dengan banyaknya

jumlah outelt vaksinasi, kerumunan yang biasa terjadi di lokasi vaksinasi bisa diatur dengan baik. "Kita sedang ngebut (vaksinasi) untuk mendapatkan herd immunity. Untuk itu, yang penting saat ini adalah memperbanyak outlet vaksinasi untuk mencegah agar tidak terjadi kerumunan," tutur Ganjar Pranowo.

Terkait pelaksanaan vaksinasi gotong royong di RS Telogorejo, Ganjar Pranowo sangat mengapresiasi pihak perusahaan, juga Kadin Jateng yang mendorong karyawan untuk divaksin. Vaksin gotong royong adalah pro-



KR-Budiono

Ganjar Pranowo memantau Vaksinasi Gotong Royong di RS Telogorejo.

gram vaksinasi yang dilaksanakan atau dibantu oleh Kadin Jateng dan RS Telogorejo. Melalui program tersebut diharapkan kesehatan masyarakat bisa lebih cepat divaksin.

Terkait stok vaksin di Jateng, Ganjar Pranowo me-

ngatakan pemerintah pusat sedang berupaya untuk ada penambahan. Pemprov Jateng sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar dalam waktu dekat vaksin tambahan untuk Jateng bisa segera datang. "Mudah-

mudahan minggu-minggu ini ada stok tambahan baru lagi untuk vaksin, sehingga bisa berjalan paralel. Vaksin gotong royong dan reguler bisa bareng. Ini untuk mempercepat terjadinya herd immunity," ujar Ganjar Pranowo. (Bdi)

Pandemi Sambungan hal 1

Apalagi di masa pandemi Covid-19, industri perbankan menjadi salah satu pilar untuk melayani aspek kebutuhan pendanaan masyarakat. Meski kinerja perbankan secara umum mengalami penurunan, tapi kinerja masih prospek.

Setidaknya ini terlihat dari kehadiran PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan merger 3 bank : PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT Bank BNI Syariah per 1 Februari 2021. Rilis OJK data statistik edisi per Desember 2020 menunjukkan pertumbuhan laba bersih antarbank sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 104,71 triliun. PT Bank Tabungan Negara Tbk - BTN tertinggi Rp 1,6 triliun (naik 664,59% dari Rp 209,26 miliar di 2019), PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) laba bersih Rp 3,07 triliun (naik 0,32% dari 2019 Rp 3,06 triliun). Ketika PT Bank Central Asia Tbk - BCA laba bersih-

nya turun 3,63% menjadi Rp 26,27 triliun pada 2020 (dari Rp 27,26 triliun di tahun 2019). Keempat, PT Bank BTPN Tbk Rp 1,39 triliun pada 2020 (turun 12,57% dari Rp 1,59 triliun) dan kelima: PT Bank OCBC NISP Tbk senilai Rp 2,3 triliun pada 2020 (turun 24,76% dari Rp 3,23 triliun).

Kemudian PT Bank Mandiri Tbk dengan laba Rp 14,15 triliun (turun 44,37% dari tahun 2019 Rp 25,44 triliun). Ketujuh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang labanya turun 45,34% menjadi Rp 21,15 triliun di 2020 dari Rp 38,70 triliun. Kedelapan, PT Bank CIMB Niaga Tbk laba turun 47,41% di 2020 menjadi Rp 1,83 triliun dari Rp 3,48 triliun. Kesembilan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Rp 1 triliun atau turun 72,97% dari Rp 3,7 triliun di 2019. Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI yang sepanjang 2020 laba bersihnya tergerus

81,17% menjadi Rp 2,75 triliun dari perolehan tahun 2019 senilai Rp 14,61 triliun.

Jika dicermati, penurunan laba perbankan secara umum terkait dengan realita pandemi sejak Maret 2020 yang kemudian juga berdampak terhadap resesi di akhir tahun 2020. Bagaimanapun juga pandemi dan resesi berpengaruh terhadap geliat ekonomi bisnis. Imbasnya, dunia usaha meredup dan tentu ini mempengaruhi kemampuan bayar utang.

Sejatinja persoalan perbankan 2021 berkaitan dengan kredit. Asumsi yang mendasari karena geliat ekonomi bisnis selama 2021 masih terjatuh pandemi dan diyakini masih akan berlanjut sampai 2022. Karena itu, hampir dapat dipastikan kinerja perbankan di tahun 2021 masih berkatut dengan persoalan akut pandemi.

Setali tiga uang dari ancaman ter-

sebut, aspek kehati-hatian dari risiko kredit perlu dicermati perbankan tahun 2021. Aspek lain yang juga menarik dicermati, tahun 2021 akan semakin meningkat tuntutan layanan berbasis digitalisasi layanan perbankan. Era kekinian yang tidak lagi bersandar kepada 3G tapi bergeser ke 4G dan 5G, memberi tantangan terhadap adopsi teknologi terbaru demi peningkatan kualitas layanan bagi nasabah.

Tuntutan adopsi dan edukasi menjadi penting. Sehingga perbankan sangat perlu melakukan investasi di bidang teknologi dan IT untuk menjamin peningkatan layanan di masa depan. Agar nasabah semakin aman, nyaman dan mudah dalam semua transaksi secara *real time online* tanpa lagi mengenal jeda ruang dan waktu.

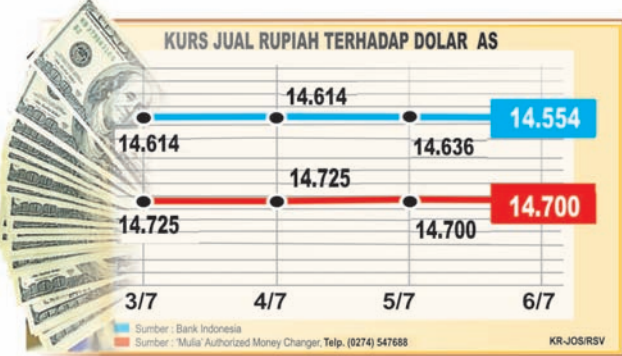
(Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo)-d

Sambungan hal 1

Tak Sambungan hal 1

(UKT) mulai tanggal 15 Juli 2021 pukul 15.00 WIB sampai dengan 22 Juli 2021 pukul 23.55 WIB. Mencetak Bukti Registrasi sesuai jadwal yang tercantum di akun SIMASTER. Mengambil jaket almamater yang jadwalnya akan diinformasikan kemudian melalui akun SIMASTER masing-masing.

Apabila sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 pukul 23.55 WIB calon mahasiswa tidak melengkapi biodata dan mengunggah dokumen dan/atau sampai dengan tanggal 22 Juli pukul 23.55 WIB tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana tersebut di atas, maka dianggap melepaskan haknya sebagai calon mahasiswa Program Sarjana atau Program Diploma IV/Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2021/2022. (Dev)-f



Prakiraan Cuaca Rabu, 7 Juli 2021					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C
Bantul					24-31
Sleman					23-31
Wates					24-31
Wonosari					23-31
Yogyakarta					23-31
Cerah					Udara Kabur
Berawan					Hujan Lokal
					Hujan Pelir

Grafis : Arko

Menkes: Sambungan hal 1

menaikkan harga jual obat kepada masyarakat.

Untuk mengatur harga obat di pasaran agar tidak merugikan masyarakat, Menkes menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Terapi Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19. Pakar kebijakan publik Agus Pam-

bagio menyatakan, penetapan HET dilakukan agar obat tetap terjangkau masyarakat, melalui studi mendalam. "HET dibuat Pemerintah agar harga obat tidak melambung tinggi, sehingga masyarakat tetap bisa mampu membeli obat," ujar Agus.

Menurut Agus, gejala harga tidak hanya di farmasi, juga di seluruh komoditas. Terutama ketika permintaan terhadap suatu barang begitu tinggi.

Karenanya, Pemerintah perlu mengatur agar kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan masyarakat bisa dikendalikan.

Terkait obat-obatan dan alat kesehatan (alkes), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto telah menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa-Bali. Surat Telegram

bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1/2021 ini terkait HET obat-obatan dan alkes di masa pandemi Covid-19. Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi lima poin penting, di antaranya melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19. (San/Ant)-d

Manajemen Risiko Pada Bisnis ... Part 1



Alfriadi Dwi Atmoko, SE, MSi, Ak, CA
Dosen Akuntansi
Universitas Amikom
Yogyakarta

HALO para pembaca yang kreatif, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen risiko pada bisnis. Ada beberapa pertanyaan mendasar mengenai ketidakmampuan suatu

perusahaan untuk bertahan dan bersaing pada bisnisnya sehingga bisnisnya mengalami kegagalan dalam operasionalnya. Jawaban atas hal tersebut tentu tergantung atas situasinya. Banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan gagal dalam operasionalnya, diantaranya adalah terdapat risiko pada bisnisnya. Nah untuk itu perusahaan perlu membuat suatu perencanaan mengenai risiko yang akan terjadi yang disebut manajemen risiko. Sebelum saya membahas mengenai manajemen risiko, perlu diketahui pengertian

dari masing-masing kata tersebut. Secara umum manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengontrol sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sedangkan risiko merupakan akibat yang timbul dan merugikan atas tindakan yang dilakukan. Sehingga secara umum manajemen risiko bisnis adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko yang dihasilkan atas kegiatan operasional bisnis sehingga kerugian yang

dialami akan semakin kecil.

Beberapa komponen manajemen risiko dalam bisnis yang perlu diperhatikan yang pertama lingkungan internal, yaitu segala risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan seperti misalnya kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan karyawan dan sebagainya.

Lingkungan internal tidak berkaitan dengan faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti pelanggan, kebijakan pemerintah, investor, supplier dan lain sebagainya. Namun efek

atas pengendalian internal yang kurang baik juga akan berimbas pada hal tersebut.

Kedua adalah penentuan sasaran, penentuan sasaran jelas berhubungan dengan visi dan misi perusahaan sehingga manajemen risiko harus dimasukkan kedalam kegiatan operasional perusahaan agar dapat tercapai visi dan misi perusahaan. Dalam kegiatan operasional perusahaan dapat dijelaskan masalah apa yang biasanya muncul dan harus tau bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

Ketiga adalah iden-

tifikasi peristiwa, maksudnya adalah perusahaan harus mengidentifikasi peristiwa atau kejadian apa saja yang berpotensi dapat mempengaruhi strategi pencapaian tujuan. Karena masing-masing kegiatan operasional berbeda, pasti berbeda pula risiko yang mungkin dapat muncul. Namun tidak semua kejadian dapat berdampak negatif yang diartikan dengan risiko, ada pula kejadian yang berdampak positif (opportunity).

Keempat penilaian risiko, penilaian risiko dimaksudkan adalah untuk

menilai sejauh mana suatu kejadian atau keadaan yang terjadi dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Besar kecilnya dampak yang terjadi dapat dianalisis menggunakan dua perspektif yaitu likelihood (kecenderungan atau peluang) dan impact/consequence (besaran dari tereaisasinya risiko). Nah itulah keempat komponen dalam manajemen risiko yang dapat saya bahas kali ini, masih terdapat empat komponen manajemen risiko lagi yang akan saya bahas pada kesempatan berikutnya. ***

